



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI WAHYU PANGESTININGSIH
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN ANATOMI
3. NHK : 813247

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.067.800.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.479 m ² /200 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 1.610.100.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 579 m ² /45 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 400.100.000		
3. Tanah Seluas 688 m ² di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.300.000		
4. Tanah Seluas 1.214 m ² di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 28.100.000		
5. Tanah Seluas 400 m ² di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 9.200.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	157.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, BRIO MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	135.618.893

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp.

2.390.618.893

Rp.

III. HUTANG**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

Rp.

2.390.618.893

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.